

# **Kebebasan dan Etika Jurnalisme: Antara Propaganda Kepentingan dan Perlawanan Wartawan**

*Muslih Aris Handayani \*)*

*Abstract: Both independence and ethics are two elements which determine the image and morals of journalism. The more highly they are respected, the healthier the press will be. Independent press is one which can present news and information which are true as it is found in reality. Independent press is not influenced by any intervention and is free from individual or group's interest. An honest and fair press presents an incident as it is for the shake of people's need. Keywords: Press, independence, journalism, honest and fair press.*

## **PENDAHULUAN**

Pers yang bebas mempunyai kekuatan luar biasa, jika mampu untuk mempengaruhi orang lain. Media berita dalam sebuah negara demokrasi pada umumnya mempunyai hak untuk melaporkan informasi tanpa persetujuan lebih dulu dari pemerintah. Banyak negara menyediakan perlindungan hukum bagi wartawan sehingga mereka dapat menjalankan hak itu, tetapi bersama dengan hak datang pula tanggung jawab bagi wartawan. Tanggung jawab yang paling mendasar adalah melaporkan berita secara akurat dan adil, yang berarti mempraktikkan jurnalisme yang etis.

Etika adalah suatu sistem prinsip yang memandu tindakan. Etika merupakan hukum yang menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Etika menyebutkan apa yang sebaiknya dilakukan seseorang berdasarkan pada nilai-nilai, baik pribadi, profesi, sosial, maupun moral yang muncul dari penalaran. Pembuatan keputusan yang etis adalah sekadar menerapkan nilai-nilai dalam pekerjaan.

---

\*) Penulis adalah alumnus IPB Bogor; dosen tetap Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto.

Deklarasi *Chapultepec*, yang disetujui oleh negara-negara di Benua Amerika, pada 1994, sebagai penangkal terhadap tekanan kebebasan berekspresi di seluruh benua. Hal itu membuat jelas bahwa jurnalisme yang etis adalah inti dari keberhasilan jangka panjang media berita. Kredibilitas pers terkait dengan komitmennya pada kebenaran, pada upaya mencapai keakuratan, keadilan, objektivitas, dan perbedaan yang jelas antara berita dan iklan. Pencapaian tujuan-tujuan ini dan penghormatan pada nilai-nilai etika dan profesi mungkin tidak dapat dipaksakan. Semua ini merupakan tanggung jawab wartawan dan media. Dalam masyarakat yang bebas, pandangan publiklah yang akan memberi penghargaan atau hukuman.

Pelanggaran etika terjadi dalam jurnalisme. Ada wartawan yang merekayasa informasi, ada redaktur yang menerima bayaran dari sumber berita, dan ada pula organisasi berita yang menerbitkan iklan dengan disamarkan sebagai berita. Ketika hal demikian terjadi, publik mempunyai hak untuk mempertanyakan apa saja yang muncul di media. Semua wartawan dan organisasi berita menderita ketika wartawan berperilaku tidak etis. Hal ini menyebabkan kredibilitas profesi tersebut dipertanyakan. Ketika kredibilitas menderita, menderita pula kemampuan organisasi untuk bisa bertahan secara ekonomi.<sup>1</sup>

## KEBEBASAN DAN ETIKA JURNALISME

### 1. Kebebasan Jurnalisme

J. Herbert Altschull dalam buku edisi pertamanya, *Agents of Power* membantah bahwa kategori dalam *four theories of the press*, yang diformulasikan selama perang dingin tidak relevan. Dia menyatakan bahwa analisis tersebut menggunakan pendekatan “kami-melawan-mereka” yang menggambarkan peperangan pada masa itu. Altschull mengatakan, “Salah satu kesulitan di hadapan kita yang paling mengkhawatirkan dalam upaya menghindari ancaman dari konfrontasi dunia adalah penggunaan label dan bahasa konflik.” Dia menyatakan bahwa pers yang mandiri tidak mungkin terwujud dan karenanya media massa hanyalah menjadi alat pemegang kekuasaan ekonomi, politik, dan semua kekuatan sosial dalam sistem apa pun. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan selama lebih dari 26 hari dan dua TV saluran nasional, para peneliti menyatakan bahwa pengaruh yang lebih besar terhadap dunia yang diciptakan oleh berita adalah lokasi sosial tiap-tiap agen berita tersebut. Mereka berpendapat bahwa pemilihan dan penyajian berita tidak begitu ber-

gantung pada kandungan berita itu sendiri, tetapi lebih pada posisi organisasi berita dalam struktur sosial yang lebih luas.<sup>2</sup>

Jurnalisme menuntut banyak hal dari para praktisinya. Sebagai suatu keterampilan profesional, jurnalisme menuntut kita untuk mengesampingkan pendapat dan kepentingan diri sendiri dan mengedepankan upaya mencari kebenaran atas nama pembaca dan masyarakat. Jurnalisme menuntut kita untuk meninggalkan agenda pribadi dan untuk menulis berdasarkan fakta dan liputan, meskipun mungkin tidak sejalan dengan tujuan favorit kita.

Kebebasan jurnalisme menuntut kita untuk menghindari konflik kepentingan, bahkan konflik yang menyangkut keuntungan ekonomi untuk diri sendiri atau organisasi pemberitaan kita. Hal ini adalah suatu standar yang bertentangan dengan realitas di sebagian besar tempat di dunia, yaitu gaji wartawan. Wartawan hanyalah sebagian pekerja yang mendapat gaji terendah dan harus membanting tulang dengan berat. Dalam dunia ideal, jurnalisme seharusnya bebas dari segala motif, kecuali untuk memberi informasi kepada publik. Jurnalisme tidak pernah boleh dimotivasi oleh keinginan untuk menjilat pemasang iklan, memperjuangkan kepentingan politik atau membantu kepentingan ekonomi si wartawan atau organisasi media.<sup>3</sup>

Hubungan antara media yang berfungsi, dengan kemajuan ekonomi telah membawa pembahasan mengenai kebebasan dan kelangsungan hidup pers keluar dari lingkungan diskusi politik. Jika pers yang tumbuh sehat bergandengan dengan kemajuan ekonomi (misalnya diindikasikan dengan menurunnya tingkat kematian anak), berarti institusi seperti Bank Dunia dan program pembangunan PBB harus mulai mendukung perkembangan media sebagai salah satu elemen yang memberi kontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang luas.

Namun demikian, interaksi antara media dengan perekonomian yang mengelilinginya tidaklah sederhana. Media memberi kontribusi kegiatan ekonomi dan kondisi ekonomi mempengaruhi kesehatan media, terutama dengan mempengaruhi audiens dan pemasang iklan yang dicari oleh organisasi berita agar bisa mandiri secara finansial. Pengalaman di berbagai negara menggambarkan bagaimana pers berada dalam suatu perekonomian, menyumbang dan memperoleh sesuatu darinya.<sup>4</sup>

Kadang-kadang koran berusaha membenarkan penerimaan hadiah atau jasa. Wartawan yang bijak tidak bisa dikatakan menerima suap seperti menerima makan atau karcis gratis ketika menonton sepak bola. Dalam masyarakat kecil, wartawan kadang-kadang mungkin menghadapi masalah

dalam mempertahankan perannya yang bebas. Ada tekanan untuk ikut dalam tugas sukarela atau dalam klub dan kelompok bisnis, atau bahkan dalam pemerintah daerah. Realitas di lapangan menunjukkan sering terjadi pertentangan kepentingan. Wartawan tidak berharap dipisahkan dari masyarakat di mana mereka hidup. Mereka juga tidak bisa melayani dua majikan yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Redaktur atau wartawan yang bijak akan sadar terhadap konflik itu, dan mempertahankan tanggung jawab profesionalnya. Tanggung jawab khusus apakah yang ditanggung pers sebagai imbalan atas perlindungan terhadap status kebebasannya itu? Tidak ada yang diuraikan dengan jelas. Sebuah koran berhak berpihak, tidak jujur, atau hal lain apa saja yang dimungkinkan oleh nurannya. Meskipun koran dapat dipersalahkan berdasarkan undang-undang penghinaan, tetapi dalam batas yang sangat luas mereka menetapkan tanggung jawab mereka sendiri. Pemikiran yang mendasari hal ini adalah dari pertentangan pendapat dan gagasan yang disajikan oleh pers bebas, pada akhirnya akan muncul sesuatu yang menyerupai kebenaran.

Pada praktiknya, kebenaran tidak selalu muncul jika tidak ada yang menggalinya. Tidak ada satu versi pun yang resmi mengenai apa yang merupakan kebenaran. Dalam masyarakat, di mana hanya ada satu koran, pembaca mungkin tidak menjumpai pandangan yang berbeda kecuali koran itu memilih untuk menyajikan pandangan tersebut. Radio atau televisi tidak selalu bisa menjadi pengganti yang efektif.<sup>5</sup>

## 2. Etika Jurnalisme

Ada satu aturan yang keramat dalam jurnalisme, kata mendiang wartawan dan novelis pemenang hadiah, John Hersey, yang meliput akibat serangan bom atom di Hiroshima. Lebih lanjut, ia mengatakan, "Penulis tidak boleh merekayasa. Keterangan dalam izin itu harus berbunyi: Tidak satu pun hal ini yang direkayasa". Wartawan yang beretika tidak menaruh kata-kata di mulut orang lain dan berpura-pura mereka pernah berada di suatu tempat, padahal tidak. Mereka tidak pernah berpura-pura mengaku bahwa pekerjaan orang lain adalah hasil karyanya sendiri. Rekayasa dan *plagiat* adalah pelanggaran terhadap standar jurnalistik dasar di seluruh dunia, tetapi pelanggaran ini tidak tampak jelas.

Wartawan menghadapi dilema etika setiap hari di bawah tekanan dari pemilik, pesaing, pemasang iklan, dan publik. Mereka memerlukan sebuah proses untuk menanggulangi dilema ini agar jurnalisme yang mereka hasilkan bersifat etis. Mereka memerlukan suatu cara berpikir tentang

isu-isu etika yang akan membantu mereka membuat keputusan yang baik, bahkan pada tenggang waktu. Di permukaan mungkin tampak cukup mudah untuk patuh pada prinsip-prinsip tersebut. Wartawan harus mencari kebenaran dan memperlakukan sumber mereka dengan hormat, tetapi kadang-kadang prinsip-prinsip itu sendiri bertentangan. Wartawan yang sedang mencari kebenaran mungkin menemukan informasi yang akan melukai keluarga seseorang yang terlibat dalam suatu tindakan kesalahan. Keanggotaan wartawan pada sebuah organisasi nonpemerintah mungkin bisa membuatnya tahu lebih banyak tentang berita yang melibatkan organisasi itu. Dalam banyak kasus, membuat keputusan yang etis berarti memilih antara yang benar dan yang salah.

Penting untuk dicatat bahwa wartawan tidak seperti dokter yang diharapkan untuk berjanji bahwa ia tidak menyebabkan kerugian. Banyak berita yang benar dan penting, akan melukai perasaan dan reputasi orang lain. Hal ini tentu tidak terhindarkan. Wartawan benar-benar meminimalkan kerugian dengan tidak menempatkan orang lain pada risiko yang tidak perlu. Dengan melewati proses untuk membuat keputusan etis yang baik, wartawan dan organisasi berita menempatkan diri pada posisi untuk secara jelas membenarkan tindakan mereka. Dengan menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan sebabnya, wartawan bisa mendukung kredibilitas dan membenarkan kepercayaan publik. Ruang redaksi yang menghargai pembuatan keputusan yang etis memastikan bahwa jenis-jenis isu dibahas, bukan hanya ketika sebuah dilema muncul. Dewan redaksi mengadakan rapat berkala untuk membahas apa yang harus mereka lakukan dalam situasi-situasi hipotetis. Wartawan yang mau mendengar dengan pikiran terbuka, tetap menjaga emosinya, serta menghindari sikap tidak luwes tentang posisi mereka, akan mampu menerapkan keterampilan-keterampilan ini dalam bekerja ketika mereka tengah menghadapi sebuah persoalan etika yang nyata.<sup>6</sup>

### 3. Kode Etika dalam Jurnalisme

Himpunan dan federasi wartawan di seluruh dunia sudah membentuk kode-kode etika untuk memandu kerja para wartawan anggotanya. Kode etika mencakup apa saja mulai dari *plagiat* sampai ke *privasi*, dan dari koreksi sampai kerahasiaan. Ada yang ringkas dan kata-katanya kabur, namun ada pula yang panjang lebar dan sangat eksplisit. Claude-Jean Bertrand, guru besar di Universitas Paris Prancis yang telah meneliti kode-kode etika dari banyak negara, mengatakan bahwa kebanyakan kode etika itu mencakup tiga unsur dasar: (1) nilai-nilai fundamental termasuk

penghormatan pada kehidupan dan solidaritas manusia; (2) larangan fundamental, termasuk tidak berbohong, menyebabkan kerugian yang tidak perlu, atau menggunakan milik orang lain; (3) prinsip-prinsip jurnalistik termasuk keakuratan, keadilan, dan independensi.

Kode-kode ini kadang-kadang bersifat sukarela dan tanpa konsekuensi yang jelas bagi pelanggarnya. Rekan sejawat dan majikan diharapkan meminta pertanggungjawaban dari wartawan yang bertindak tidak etis. Di beberapa negara, Dewan Pers mendengarkan keluhan terhadap wartawan dan dapat merekomendasi tindakan untuk memperbaiki kesalahan. Majalah-majalah pengulas jurnalisme juga berfungsi sebagai korektor dengan memaparkan tingkah-laku wartawan yang tidak etis. Beberapa organisasi berita punya seorang staf yang disebut *ombudsman* dengan tugas melihat-lihat kesalahan, pelanggaran etika, serta menjadi wakil publik di dalam ruang redaksi.

Di negara-negara tempat wartawan wajib menjadi anggota serikat kerja atau himpunan, kode etikanya sering mencakup sebuah ketentuan pelaksanaannya. Misalnya, Himpunan Wartawan Australia mempunyai komisi hukum yang menyelidiki tuduhan tingkah-laku tidak etis terhadap wartawan. Wartawan yang diketahui melanggar dapat dicela, didenda, atau dikeluarkan dari kelompoknya. Selain kode etika nasional dan regional, banyak organisasi berita mempunyai kode tingkah-laku atau standar praktik sendiri yang diharapkan akan diikuti oleh para wartawannya. Kode ini mungkin menyebutkan tindakan atau kegiatan spesifik yang mungkin dianjurkan atau dilarang, atau yang memerlukan persetujuan wartawan. Banyak peraturan dalam kode tingkah-laku redaksi berkaitan dengan independensi jurnalistik. Bahkan, untuk menghindari konflik kepentingan, wartawan mungkin dilarang mempunyai saham atau kepentingan pribadi di perusahaan yang mereka liput. Wartawan mungkin tidak boleh mengambil posisi publik dalam sebuah isu politik, atau secara terbuka mendukung seorang calon untuk jabatan publik. Organisasi berita mungkin melarang wartawan punya hubungan bisnis dengan sumber berita manapun, atau melakukan pekerjaan sampingan demi uang kecuali atas persetujuan manajer.

Mungkin mustahil menghindar setiap potensi konflik, tetapi wartawan perlu menyadari bahwa tingkah-laku mereka bisa memberi kesan buruk pada organisasi berita. Bila mereka merasa bahwa konflik mungkin timbul diharapkan memberi tahu atasan. Wartawan yang mempunyai hubungan pribadi dengan sebuah berita mungkin bisa meminta wartawan lain untuk menggantikannya. Banyak organisasi berita menjadikannya suatu praktik

dengan meminta wartawan mengungkapkan hubungan dalam berita-berita yang mungkin menyiratkan adanya konflik kepentingan, sekalipun sebenarnya konflik itu tidak ada. Kode tingkah pada umumnya berupa dokumen internal, tetapi makin banyak organisasi berita yang memasang di *situs web* sehingga publik bisa tahu apa yang mereka harapkan, dan dapat meminta koran atau stasiun siaran bertanggung jawab manakala standar itu dilanggar.<sup>7</sup>

## PROPAGANDA KEPENTINGAN ATAS MEDIA DAN PER-LAWANAN WARTAWAN

### 1. Kasus Penguasaan Rezim Orde Baru atas Media

Kejatuhan rezim Orde Baru sudah berlangsung hampir sepuluh tahun. Pemerintahan baru yang menggantikan Orde Baru telah berganti empat kali. Saat sejumlah negara tetangga yang juga dilanda krisis pertengahan 1997 telah bangkit, Indonesia masih berkutat dengan krisis multi-dimensional. Di masa lalu, Soeharto menghambat karier setiap calon pemimpin yang mengorbit. Ia tidak ingin ada orang yang bersinar yang menyaingi dirinya. Semua potensi kekuatan oposisi dan pengkritik dibungkam, termasuk pers. *Civil society* ditempatkan di luar wilayah *nation*. Negara sepenuhnya dikuasai oleh Orde Baru. Secara perlahan, sumber daya alam dikuras habis untuk menghidupi para kroni kekuasaan. Utang luar negeri yang seharusnya dipakai untuk menyejahterakan rakyat, dikorupsi untuk kalangan keluarga dekat presiden. Melalui Bulog, presiden mengontrol semua tata niaga yang menyangkut kebutuhan dasar, sekaligus melakukan kutipan dan *mark up* untuk dana politik abadi bagi pelanggaran kekuasaan.

Sebagian besar institusi pers yang ada adalah institusi yang berkembang dan tumbuh di zaman Soeharto. Selama puluhan tahun institusi ini telah terbiasa bekerja dalam situasi *represif*. Banyak pemimpin media yang merepresi wartawan mereka yang kritis. Mereka juga melakukan swasensor dalam pemberitaannya. Lebih jauh lagi, banyak pimpinan media massa di masa lalu yang membangun kerja sama dengan orang-orang penting di lingkungan kekuasaan. Dalam situasi yang runyam ini, banyak orang bertanya-tanya di mana sebenarnya posisi pers yang ideal, terutama ketika berhadapan dengan kekuasaan. Di negara komunis, pers diletakkan sebagai bagian dari kekuasaan. Pers dianggap sepenuhnya sebagai milik negara, dan kontrol media yang super ketat semata-mata karena media

dianggap sebagai kepanjangan tangan negara. Pers dilarang mengkritik penguasa, termasuk semua kebijakan yang dibuat partai.

Di Indonesia, sejak pasca-Malari 1974, di mana terjadi pembredelan terhadap sejumlah pers, diberlakukan berbagai macam aturan untuk mengontrol pers agar jangan ada lagi pers macam *Indonesia Raya* dan *Mahasiswa Indonesia* yang vokal. Ketika mahasiswa pada akhir tahun 1977 mulai memprotes kebulatan tekad pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden RI, pemerintah segera membuldoser mahasiswa dengan mengeluarkan kebijakan kewajiban mengikuti P4 bagi setiap warga bangsa. Dalam dunia pers dikenalkan istilah Pers Pancasila. Sistem pers yang dipraktikkan sejak zaman Menpen Ali Murtopo diteruskan secara lebih canggih oleh Harmoko. Ada semacam *chauvinisme* bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang unik yang mempunyai Pancasila sebagai pegangan hidup rakyatnya. Apa tujuan dari semua ini? Upaya untuk mendukung dan memperkuat politik pemerintah dengan meniadakan ruang bagi oposisi. Ideologi yang ditekankan adalah pembangunan, stabilisasi, dan pemerataan. Ruang yang tersisa bagi pers adalah iklan dan hiburan.

Penerbitan pers diatur dan diawasi melalui ketentuan SIT (kemudian SIUPP) dan STT. Berbagai imbauan, teguran, dan panggilan terhadap redaksi dilancarkan oleh sejumlah instansi seperti Kejaksaan Agung, Direktorat PPG, Deppen, PWI, hingga organisasi preman yang bernaung di bawah ketiak kekuasaan. Sejumlah teror dan penangkapan wartawan terjadi di mana-mana. Sejumlah perusahaan pers ditutup dengan alasan telah menyerang kekuasaan, membocorkan rahasia negara, menyebarkan kebencian, dan sebagainya. Dengan demikian, pemerintah Orde Baru secara perlahan telah mengembangkan apa yang disebut sebagai *kekuasaan hegemoni*.

Pers yang mau bertahan hidup terpaksa melakukan swasensor. Semua berita tentang *the first family*, perpecahan elit, praktik KKN, pertikaian SARA, isu sakitnya kepala negara, skandal pejabat tinggi, dan sebagainya terpaksa disapu. Masyarakat umum tidak lagi menemukan fakta-fakta. Untuk menuliskan isu yang peka, pers terpaksa menggunakan kata-kata berbentuk *eufemisme*. Bisa dikatakan bahwa era kuatnya Orde Baru ini adalah era hitam bagi pers Indonesia. Jangankan membicarakan etika, membicarakan kebebasan saja di kalangan pers Indonesia relatif tidak memiliki makna apa-apa. Semuanya diredam dan diabaikan atas nama stabilitas. Di tengah situasi seperti ini, sejumlah tokoh senior wartawan

antara lain Rosihan Anwar mempersilakan wartawan untuk mengambil amplop asal tidak mempengaruhi pemberitaan yang ditulis wartawan.<sup>8</sup>

## 2. Perlawanan Wartawan: Kasus Perlawanan Pasca Tumbangnya Rezim Orde Baru

Sejak keruntuhan rezim Soeharto, menjadikan pers Indonesia sebetulnya telah berada pada era kebebasan. Banyak media yang sebelumnya dilarang, bisa terbit kembali. Ketentuan SIUPP dan STT sudah tidak berlaku lagi. Departemen penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999. Dalam dunia jurnalistik, wartawan selalu menghadirkan kebenaran sebagai tujuan dan pekerjaannya. Proses ini meliputi memilih narasumber, wawancara, sampai saat menuliskannya sebagai berita. Dalam praktiknya, wartawan jarang memperoleh kesempatan, sumber, atau pengetahuan dari seorang ahli untuk mendapatkan kebenaran sendiri. Dengan kondisi ini, wartawan selalu berusaha untuk mengumpulkan informasi selengkap mungkin dari sumbernya. Selama wawancara, wartawan akan menggunakan naluri untuk membedakan mana cerita imajinatif dan mana cerita yang benar. Wartawan selalu menolak suatu wawancara yang mendapatkan pengarahan atau dalam suasana resmi di mana narasumber berada dalam tekanan dan sebagainya. Wartawan lebih mengutamakan kerja investigasi dan menemui sumber-sumber langsung di lapangan yang jauh dari kemungkinan rekayasa pernyataan. Mereka yakin pada *vox populi vox dei*, alias suara rakyat adalah suara Tuhan. Sering dijumpai bagaimana wartawan mencoba mengangkat masalah penyilangan rumah penduduk dengan cat merah oleh aparat TNI. Pemberitaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh BBC London ini berhasil membuat PDMD mengeluarkan perintah penghentian aksi yang bisa menjurus kepada kejahatan perang tersebut.<sup>9</sup>

Wartawan Harry Surjadi sangat meyakini prinsip yang sering membuatnya berseteru dengan orang-orang yang berkuasa. Surjadi berusaha menggunakan kekuatannya sebagai wartawan untuk memerangi kerusakan lingkungan di Indonesia. Meskipun, hal itu bisa berarti ia gagal memberi kesempatan yang sama kepada mereka yang tidak seprinsip dengannya untuk membawa kasus mereka ke publik. Surjadi bekerja sebagai wartawan lepas, setelah sepuluh tahun bekerja di harian *Kompas*. Di *Kompas*, ia juga meliput berita tentang lingkungan hidup dan ia tidak ragu-ragu mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk meyakinkan orang, bukan untuk memberi informasi pada mereka. Selama bekerja di *Kompas*, Surjadi dituduh menjadi anggota kelompok advokasi lingkungan. Ia

membantah dan mengatakan bahwa keterlibatannya dalam suatu kelompok untuk menyelidiki berbagai kasus. Sebagian wartawan mengatakan bahwa Surjadi lebih merupakan seorang aktivis dari pada wartawan. Ia membantah dan mengatakan bahwa jurnalisisme baginya adalah sebuah alat. Ia mengatakan, "Saya harus bekerja secara profesional, tetapi saya juga harus membuat lingkungan hidup Indonesia lebih baik. Itu adalah kepedulian saya yang terbesar."

## **KODE ETIK JURNALIS YANG PROFESIONAL**

Para anggota masyarakat jurnalis profesional percaya bahwa pencerahan merupakan pelopor keadilan dan landasan demokrasi. Kewajiban seorang wartawan adalah mendorong tercapainya tujuan-tujuan ini dengan mencari kebenaran, dan menyediakan uraian yang jujur dan lengkap tentang peristiwa dan isu. Wartawan yang berhati nurani dari semua media, dan keahliannya untuk melayani publik dengan ketelitian dan kejujuran. Integritas profesi adalah dasar bagi kredibilitas wartawan. Masyarakat jurnalis profesional menjunjung tinggi perilaku etis dan menggunakan kode ini untuk menyatakan prinsip-prinsip dan standar jurnalis profesional.

### **1. Bersifat Jujur, Adil, dan Berani**

Wartawan harus jujur, adil, dan berani dalam mengumpulkan dan menafsirkan informasi. Wartawan hendaknya:

1. Menguji ketepatan informasi dari semua sumber dan menjalankan kehati-hatian untuk menghindari kesalahan sia-sia. Pemelintiran secara sengaja tidak diperbolehkan.
2. Rajin menemukan subjek dari berita agar mereka mempunyai kesempatan untuk menanggapi tuduhan perbuatan tidak baik.
3. Berusaha mengungkap jati diri narasumber bila mungkin. Publik berhak mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang kredibilitas narasumber.
4. Senantiasa menanyakan motif narasumber sebelum berjanji tidak akan menyebutkan namanya. Menjelaskan syarat-syarat yang menyertai janji itu sebagai ganti informasi yang diterima.
5. Memastikan bahwa kepala berita, isi berita, dan bahan-bahan promosi, foto, video, audio, grafik, inti pernyataan, dan kutipan seseorang tidak disalahpahami. Menghindari untuk menyederhanakan atau terlalu menyoroti peristiwa-peristiwa sampai keluar konteks.

6. Menghindari memelintir isi foto atau video berita. Pembesaran gambar demi kejelasan teknis diperbolehkan.
7. Menghindari rekonstruksi yang menyesatkan atau peristiwa berita yang sudah diatur.
8. Menghindari metode pengumpulan informasi secara sembunyi-sembunyi atau mencuri-curi, kecuali jika cara-cara terbuka yang biasa tidak bisa memberikan informasi yang penting bagi masyarakat. Penggunaan metode demikian harus dijelaskan sebagai bagian dari berita.
9. Menjauhi plagiat.
10. Menceritakan variasi dan pentingnya pengalaman manusia dengan penuh keberanian.
11. Menghindari stereotip berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, suku, geografi, penampilan fisik, dan status sosial.
12. Mendukung pertukaran pandangan yang terbuka, bahkan pandangan yang menyinggung sekalipun.
13. Memberdayakan kaum pinggiran dan sumber-sumber resmi maupun tidak resmi.

## **2. Meminimalkan Kerugian**

Jurnalis yang etis memperlakukan narasumber, subjek, dan rekan kerjanya sebagai manusia yang pantas dihormati. Jurnalis hendaknya:

1. Menunjukkan simpati kepada mereka yang mungkin terkena dampak buruk pemberitaan. Menggunakan kepekaan yang khusus bila sedang berhadapan dengan anak-anak atau narasumber dan subjek yang tidak berpengalaman.
2. Bersikap peka bila sedang mengusahakan, atau menggunakan wawancara, atau foto bagi yang menjadi korban bencana alam.
3. Menyadari bahwa mengumpulkan dan melaporkan berita bisa menyebabkan kerugian dan ketidaknyamanan.
4. Menyadari bahwa orang biasa mempunyai hak yang lebih besar untuk menyimpan informasi tentang diri mereka dari pada pejabat publik atau orang lain yang mencari kekuasaan, pengaruh atau perhatian.
5. Berhati-hati dalam menyebutkan jati diri tersangka yang masih remaja atau korban kekerasan seks.
6. Berhati-hati dalam menyebutkan nama tersangka kejahatan sebelum ada dakwaan resmi.

### 3. Bertindak Independen

Wartawan hendaknya bebas dari kewajiban kepentingan apa saja, selain dari hak masyarakat untuk tahu. Jurnalis hendaknya:

1. Menghindari konflik kepentingan baik yang nyata maupun diduga.
2. Tetap bebas dari kaitan kegiatan yang mungkin mengganggu integritas atau merusak kredibilitas.
3. Menolak hadiah, pilih kasih, ongkos, perjalanan gratis atau perlakuan khusus, serta menghindari kerja sampingan, keterlibatan politis, jabatan publik atau dinas dalam organisasi komunitas jika mengganggu integritasnya sebagai wartawan.
4. Membeberkan konflik yang tidak terhindarkan.
5. Waspada dan berani meminta pertanggungjawaban orang yang berkuasa.
6. Tidak memberi pelayanan istimewa bagi pemasang iklan.
7. Berhati-hati dengan nara sumber yang menawarkan informasi demi perlakuan khusus atau uang.
8. Bertanggung jawab.
9. Menceritakan dengan rinci dan menjelaskan liputan berita serta mengundang dialog dengan publik tentang perilaku jurnalis.
10. Mendorong publik untuk menyuarakan keluhan mereka terhadap media berita.
11. Mengakui kesalahan dan mengoreksinya dengan segera.
12. Mempublikasikan praktik tidak etis jurnalis dan media berita.
13. Mematuhi standar yang sama tingginya dengan standar yang mereka harapkan dipatuhi orang lain.<sup>10</sup>

### PENUTUP

Kebebasan dan etika jurnalisme yang penulis paparkan di atas sebagai refleksi atas perjuangan pers dan wartawan untuk mewujudkan pers yang bebas dari unsur kepentingan, kekuasaan, dan faktor-faktor lain yang merusak jati diri dunia pers. Pers yang bebas membentuk tatanan masyarakat yang transparan, kontrol yang kuat, dan keadilan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat.

Dengan adanya pers yang bebas ini, masyarakat ikut berperan serta dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan. Rakyat semakin dewasa dan bebas memberikan masukan untuk perbaikan kinerja. Penyelewengan sedikit atau banyak akan berkurang dengan ditegakkannya keadilan yang diekspos oleh wartawan. Tujuan pers yang bebas pada akhirnya untuk

memenuhi keadilan rakyat dan untuk mendapatkan berita sesuai fakta yang terjadi. Pada akhirnya, pers yang bebas sangat menentukan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Akhirnya, kita perlu merenungkan perkataan Joseph Pulitzer dalam *The North American Review*, “Republik kita dan pers-nya akan timbul dan tenggelam bersama-sama. Pers yang sinis, mata duitan, dan menggebu-gebu akan menghasilkan masyarakat yang sama rendahnya”.

## ENDNOTE

<sup>1</sup> Deborah Potter, *Buku Pegangan Jurnalisme Independen* (New York: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2006), hal. 55.

<sup>2</sup> Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr., *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa* (Jakarta: Prenada Media, 2001), hal. 383-385.

<sup>3</sup> International Center of Journalists, *Etika Jurnalisme: Debat Global* (Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat, 2006), hal. 79.

<sup>4</sup> Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Mencari Media yang Bebas dan Bertanggungjawab* (Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat, 2006), hal. 21.

<sup>5</sup> Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Pers Tak Terbelenggu* (Jakarta: Dinas Penerangan dan Kebudayaan, 2004), hal. 35.

<sup>6</sup> Deborah Potter, *Buku Pegangan*, hal. 57.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 58.

<sup>8</sup> International Center of Journalists, *Etika Jurnalisme*, hal. x-xi.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. xvi.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 107-109.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. 2004. *Pers Tak Terbelenggu*. Jakarta: Dinas Penerangan dan Kebudayaan.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Mencari Media yang Bebas dan Bertanggungjawab*. Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- International Center of Journalists. 2006. *Etika Jurnalisme: Debat Global*. Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- Potter, Deborah. 2006. *Buku Pegangan Jurnalisme Independen*. New York: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
- Severin, Werner J. dan James W. Tankard, Jr. 2001. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Jakarta: Prenada Media, 2001.